EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Apakah Transparansi Pajak Memoderasi Hubungan antara Pengungkapan Keberlanjutan dan Penghindaran Pajak?

Claren Prawidya Daniswara[1], Intan Kurnia Permatasari[2]
[1,2]Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
E-mail: Claren.23219@mhs.unesa.ac.id[1], intanpermatasari@unesa.ac.id[2]

Article History:
Received: 30 Oktober2026
Revised: 02 November 2026
Accepted: 15 November 2026

Keywords: *sustainability reporting; tax avoidance; tax transparency; GRI 207; cash effective tax rate; ASRA.*

Abstract: *Penelitian ini menguji pengaruh tingkat pembayaran pajak perusahaan dan pengungkapan transparansi pajak berbasis GRI 207 terhadap jumlah pengungkapan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan sebagai kerangka analisis. Laporan keberlanjutan dari 18 perusahaan pemenang Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) yang mengungkapkan standar GRI 207 dengan total 72 observasi perusahaan-tahun selama periode 2021-2025 diteliti. Analisis konten dilakukan terhadap Standar Topik GRI 200, 300, dan 400 (SRDI) serta empat poin pengungkapan GRI 207. Pembayaran pajak perusahaan diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), di mana nilai CETR yang lebih tinggi mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Analisis regresi efek acak (random effects) panel dan regresi moderasi dilakukan dengan mengendalikan variabel ukuran perusahaan, return on assets, dan leverage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SRDI memiliki hubungan positif yang signifikan dengan CETR (β = 0,2006, p < 0,001). Namun, transparansi pajak dan interaksinya dengan SRDI tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (masing-masing dengan β = 0,1595, p = 0,075 dan β = -0,1291, p = 0,267). Sampel penelitian menunjukkan adanya pembayaran pajak tunai yang lebih tinggi seiring dengan pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih luas, meskipun pengungkapan transparansi pajak berdasarkan standar GRI 207 belum memberikan pengaruh yang cukup kuat.*

PENDAHULUAN

Sebagai contoh dari banyak praktik serupa di seluruh dunia, Bergin (2012) mengungkapkan bahwa Starbucks di Inggris hanya membayar £8,6 juta pajak penghasilan perusahaan di Inggris dari penjualan £3 miliar di Inggris. Sering kali, kasus tersebut dianggap sebagai salah satu dari banyak kasus yang mencontohkan ketidakseimbangan antara persepsi tanggung jawab sosial dan praktik penghindaran pajak. Di mata publik, sebuah perusahaan tampak bertanggung jawab dan di mata pemerintah, kontribusi sebuah perusahaan terhadap kas negara masih harus dipertanyakan. Zucman (2022) mengamati bahwa lebih dari 50% dari pendapatan luar negeri dari banyak perusahaan multinasional Amerika Serikat disalurkan ke surga pajak. Dengan persentase pendapatan yang sangat tinggi tersebut, praktik penghindaran pajak cenderung untuk tidak terlalu

terlihat.

Meskipun laporan keberlanjutan sekarang banyak dipublikasikan, laporan tersebut tidak menjelaskan tingkat pajak yang dibayar oleh sebuah perusahaan. Survei KPMG (2024) mencatat bahwa di 2024, lebih dari 96% dari perusahaan kelompok G250 dan 79% perusahaan kelompok N100 memublikasikan laporan keberlanjutan. Praktik publikasi laporan keberlanjutan ini memunculkan pertanyaan yang lebih krusial. Jika banyak perusahaan memublikasikan laporan keberlanjutan yang panjang lebar, apakah tingkat pajak yang mereka bayarkan juga tinggi?

Terdapat dua teori besar yang menjawab pertanyaan ini dengan sangat berbeda. Teori legitimasi memprediksi bahwa perusahaan dengan banyak komitmen sosial akan lebih patuh membayar pajak agar reputasinya tidak rusak akibat perilaku membayar pajaknya (Deegan, 2002). Sebaliknya, teori pemangku kepentingan berargumen bahwa banyak tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar dari para investor, para pemajak, dan publik dapat membuat sebuah perusahaan lebih patuh (Freeman, 1984). Meskipun demikian, perusahaan dapat menggunakan teknik pelaporan simbolis. Sejauh ini, banyak bukti empiris yang ada juga menunjukkan hasil yang beragam. Lanis dan Richardson (2012) menemukan bahwa pengungkapan CSR yang banyak dikaitkan dengan lebih agresifnya perilaku membayar pajak di perusahaan Australia. Sari dan Tjen (2016) melaporkan hal yang sama untuk konteks Indonesia, sementara Davis et al. (2016) melaporkan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial justru membayar pajak lebih rendah. Mayberry dan Watson (2021) tidak menemukan hasil yang signifikan melalui eksperimen alami yang mereka lakukan. Xu et al. (2022) menemukan bahwa perusahaan yang lebih banyak melakukan penghindaran pajak cenderung membuat laporan CSR mereka lebih mudah dibaca, temuan ini dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan kembali legitimasi.

Beberapa studi mengkaji pelaporan informasi pajak dalam kerangka yang lebih luas. Sebagai contoh, standar baru di bawah GRI 207: Tax, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021, menetapkan empat standar pajak yang berbeda. Standar tersebut mencakup aspek-aspek berikut: pendekatan terhadap pajak, tata kelola pajak dan manajemen risiko, keterlibatan pemangku kepentingan terkait pajak, serta pelaporan pajak per negara (*country-by-country tax reporting*). Penelitian mengenai persyaratan pelaporan pajak berdasarkan standar Uni Eropa menunjukkan bahwa keterbukaan dalam pelaporan pajak berujung pada beban pajak efektif atau tarif pajak yang lebih tinggi. Selain itu, Joshi (2020) serta Overesch dan Wolff (2021) menunjukkan bahwa standar transparansi pajak di Eropa mengakibatkan peningkatan beban pajak efektif. Hal serupa juga diamati oleh Hechtner et al. (2024) pada perusahaan yang menerapkan GRI 207. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada studi yang mengkaji standar transparansi pajak menurut GRI 207 serta dampaknya terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan di Asia yang mengalihkan laba ke anak perusahaan.

Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan meneliti perusahaan-perusahaan yang telah memenangkan penghargaan Asian Sustainability Reporting Awards (ASRA). Perusahaan-perusahaan yang dipilih untuk studi ini merupakan pemenang penghargaan atas laporan keberlanjutan mereka, yang berarti mereka telah menunjukkan kualitas pelaporan keberlanjutan yang lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya (CSRWorks International, 2025). Penulis telah menyeleksi para pemenang tersebut secara cermat untuk studi kasus ini guna mengkaji potensi kesenjangan antara pelaporan keberlanjutan perusahaan dengan pembayaran pajak yang sebenarnya. Penulis menyajikan dua kontribusi dalam studi ini, pertama, pengungkapan keberlanjutan umum (GRI seri 200, 300, dan 400) dipisahkan dari pengungkapan pajak (GRI 207) agar hubungan masing-masing dengan pembayaran pajak bisa dibedakan. Kedua, transparansi pajak diuji pada periode setelah GRI 207 berlaku.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori legitimasi sebagai dasar awal. Teori tersebut menyatakan bahwa sebuah organisasi akan dapat bertahan apabila perilaku organisasi tersebut sejalan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan secara sukarela yang dilakukan oleh sebuah organisasi bertujuan untuk mempertahankan kontrak sosial yang ada (Deegan, 2002; Dowling & Pfeffer, 1975). Suchman (1995) membagi legitimasi menjadi tiga dimensi, yaitu pragmatis, moral, dan kognitif. Dimensi moral sangat penting untuk topik perpajakan, karena masyarakat menilai perpajakan dari sudut pandang moral. Dalam teori piramida tanggung jawab sosial, kontribusi fiskal yang layak dianggap sebagai tanggung jawab ekonomi yang paling mendasar (Carroll, 1991). Berdasarkan teori ini, muncul dua prediksi yang berlawanan. Secara substansial, perilaku pajak sebuah perusahaan cenderung tidak berubah karena perusahaan tersebut menjadikan pelaporan berkelanjutan sebagai dasar legitimasi mereka. Sebenarnya perilaku pajak dianggap sebagai tanggung jawab ketidaktanggung jawaban korporasi (Hoi et al., 2013). Secara simbolik, sebuah perusahaan dapat melakukan pengungkapan secara luas guna mengembalikan legitimasi yang telah hilang akibat penghindaran pajak yang telah dilakukan (Xu et al., 2022).

Teori kedua adalah teori pemangku kepentingan. Teori tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab sebuah organisasi tidak hanya kepada pemegang saham saja, tetapi kepada seluruh pihak yang berhubungan atau yang terpengaruh oleh organisasi (Freeman, 1984). Clarkson (1995) membagi pemangku kepentingan menjadi pemangku kepentingan utama dan pemangku kepentingan sekunder. Mitchell et al. (1997) menetapkan prioritas pemangku kepentingan berdasarkan kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Investor dan otoritas pajak, sebagai contoh, memiliki ketiga hal tersebut terhadap informasi perpajakan. Dengan adanya informasi perpajakan yang terstruktur, maka para investor dan otoritas pajak tersebut dapat dengan mudah menilai perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, tanpa perlu narasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keterbukaan atau transparansi perpajakan dapat menjadi pemoderasi terhadap hubungan antara perilaku pajak dan narasi berkelanjutan.

Konstruk dan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan tiga konstruk utama. Laporan keberlanjutan mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan dengan referensi pada GRI Standards. Standards tersebut terdiri atas *Universal Standards* (GRI 1, 2, dan 3) yang menyangkut prinsip dan pengungkapan umum serta *Topic Standards* seri 200, 300, dan 400 untuk topik ekonomi, lingkungan dan sosial (GRI, 2021). Penghindaran pajak merupakan strategi yang eksplisit untuk mengurangi pajak, mulai dari penggunaan insentif yang legal sampai tindakan yang agresif pada area hukum yang masih abu-abu (Hanlon & Heitzman, 2010). Proksi dari penghindaran pajak yang sering digunakan adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang membandingkan antara pembayaran pajak kas dengan laba sebelum pajak (Dyreng et al., 2008). Konstruk ketiga dari penelitian ini adalah transparansi pajak, yang berarti sejauh mana perusahaan menginformasikan pendekatan, tata kelola, dan realisasi perpajakan mereka. Hal ini tertuang dalam empat pengungkapan pada GRI 207, yakni 207-1 sampai dengan 207-4 (GRI, 2019).

Studi tentang CSR dan pajak memiliki tiga pola. Studi dengan pola pertama menemukan hubungan negatif antara CSR dan agresivitas pajak, misalnya pada 408 perusahaan Australia pada tahun 2008/2009 (Lanis & Richardson, 2012) dan pada perusahaan nonkeuangan pada Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012 (Sari & Tjen, 2016). Studi pola kedua memiliki hasil yang berlawanan (Davis et al., 2016; Mayberry & Watson, 2021). Pada pola ketiga, studi tersebut mengungkapkan

bahwa pengungkapan dilakukan sebagai respons terhadap tindakan penghindaran pajak (Xu et al., 2022). Semua studi tersebut menganggap CSR sebagai keseluruhan, tanpa pemisahan informasi perpajakan secara khusus.

Penelitian dengan topik transparansi pajak juga memberikan hasil yang cenderung seragam, meski dengan konteks yang berbeda. Meskipun transparansi pajak telah diteliti dalam berbagai konteks yang berbeda, banyak studi menyimpulkan adanya keterkaitan antara transparansi pajak dengan peningkatan tarif pajak. Salah satu studi menyimpulkan bahwa terdapat kenaikan tarif pajak, baik dalam kerangka pelaporan pajak *Country-by-Country* (CbC) versi publik maupun privat, di negara-negara anggota Uni Eropa (Joshi, 2020; Overesch & Wolff, 2021). Berdasarkan temuan dalam sebuah studi tahun 2024, tarif pajak GAAP pada perusahaan-perusahaan di Uni Eropa yang telah menerapkan standar pelaporan CbC (GRI 207) mengalami peningkatan sekitar 2% (Hechtner et al., 2024). Studi-studi ini menyoroti bahwa standar pelaporan pajak memengaruhi hasil yang dicapai. Studi lain yang menggunakan eksperimen survei terhadap investor non-profesional pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa laporan CbC yang lebih terperinci memicu perubahan perilaku investor, sementara perubahan dalam laporan strategi pajak memberikan dampak yang lebih kecil (Göttsche et al., 2024). Studi di kawasan Asia, termasuk penelitian yang berfokus pada perusahaan di sektor sumber daya alam di Indonesia dan Malaysia, menunjukkan bahwa penggunaan standar pelaporan pajak GRI 2019 menyediakan informasi material bagi para pemangku kepentingan (Asmoro et al., 2024). Studi lebih lanjut menemukan bahwa di negara-negara berkembang, pelaporan pajak yang menggunakan standar GRI memberikan manfaat berupa berkurangnya aktivitas penghindaran pajak (Rudyanto, 2025).

Hipotesis

Ketiga hipotesis ini didasarkan pada teori legitimasi (sebuah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana suatu entitas memperoleh legitimasi dari lingkungan eksternalnya). Interpretasi substantif menunjukkan bahwa pengungkapan yang sangat terperinci dapat menyebabkan hilangnya kredibilitas perusahaan jika pembayaran pajak tidak selaras dengan retorika perusahaan tersebut. Di sisi lain, interpretasi simbolis menunjukkan bahwa pelaporan semacam itu dapat menghasilkan penilaian positif dari pihak eksternal, karena lingkungan eksternal memandang pembayaran pajak sebagai bentuk kepatuhan. Akan tetapi, pengungkapan yang cukup terperinci justru berujung pada pembayaran pajak yang lebih tinggi, sehingga mengurangi praktik pengelakan pajak, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi entitas tersebut. Interpretasi simbolis bertolak belakang dengan prediksi ini. Untuk tujuan tersebut, tiga hipotesis akan diajukan dan diuji.

H1: Pengungkapan keberlanjutan (SRDI) berasosiasi dengan CETR.
H2: Transparansi pajak (TTI) berasosiasi dengan CETR.
H3: Transparansi pajak memoderasi asosiasi antara SRDI dan CETR.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tiga hipotesis yang diajukan dengan metode kuantitatif asosiatif (eksplanatori) yang didukung oleh panel tidak seimbang dengan data sekunder. Metode ini memberikan hasil analisis statistik tentang hubungan variabel pada sampel, namun tidak memberikan penjelasan mengenai hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, pengungkapan keberlanjutan adalah variabel independen, sedangkan CETR sebagai variabel dependen dan transparansi pajak adalah variabel moderasi.

Perusahaan pemenang penghargaan ASRA yang berada di kawasan Asia dari tahun 2021

hingga 2025 menjadi populasi dalam penelitian ini (CSRWorks International, 2025). Penulis mendapatkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan melalui situs masing-masing perusahaan. Dalam penentuan sampel, penulis menerapkan tiga kriteria. Pertama, perusahaan konsisten memublikasikan laporan keberlanjutan untuk kurun waktu tahun 2021 hingga 2025. Kedua, perusahaan menerapkan dan memublikasikan tata kelola perpajakan sesuai GRI 207: Tax (2019), baik seluruh atau sebagian, pada sekurang-kurangnya satu tahun dalam kurun waktu pengamatan. Pada tahun perusahaan tidak memublikasikan tata kelola perpajakan, perusahaan tetap diikutsertakan dan memperoleh nilai 0 pada indeks transparansi perpajakan. Ketiga, perusahaan tidak termasuk dalam sektor keuangan dan data perhitungan CETR tersedia untuk perusahaan tersebut. Perusahaan yang dalam laporan laba sebelum pajak tercatat sebesar nol atau minus pada tahun tersebut dikeluarkan dari penelitian karena pada kondisi itu CETR tidak bermakna.

Tabel 1 menyajikan rangkuman penentuan sampel. Berdasarkan data 171 pemenang, didapat 101 perusahaan, dan dari 101 perusahaan tersebut didapat 18 perusahaan sampel, sehingga terdapat 90 *firm-year*. Terdapat 11 perusahaan yang mengalami kerugian pada *firm-year*, sehingga tersisa 79 *firm-year*. Terdapat 7 observasi lain yang tidak digunakan dalam estimasi akhir, sehingga hasil estimasi pada penelitian ini menggunakan 72 observasi yang berasal dari 18 perusahaan. Penulis menggunakan metode estimasi panel standar karena metode ini mampu menangani data panel yang tidak seimbang, sehingga kondisi ini tidak menjadi kelemahan metodologis (Baltagi, 2021).

Tabel 1. Proses seleksi sampel

Tahap seleksi	Jumlah
Data pemenang ASRA tahun 2021-2025	171
Perusahaan tercatat lebih dari satu kali selama 2021-2025	(70)
Perusahaan unik pemenang ASRA 2021-2025	101
Perusahaan yang tidak mengungkapkan GRI 207: Tax	(73)
Perusahaan yang tidak menerbitkan Annual Report dan Sustainability Report berturut-turut selama 2021-2025	(4)
Perusahaan sektor keuangan	(5)
Perusahaan tanpa data yang diperlukan untuk menghitung CETR	(1)
Perusahaan sampel (18 perusahaan × 5 tahun = 90 observasi)	18
Observasi *firm-year* dengan laba sebelum pajak nol atau negatif	(11)
Observasi *firm-year* tanpa Sustainability Report berbasis GRI	(7)
Observasi dalam estimasi akhir	72

Sumber: diolah dari hasil penelitian (2026).

Indeks Pengungkapan Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting Disclosure Index*/SRDI) disusun melalui analisis konten terhadap laporan keberlanjutan. Butir-butir dari Standar Topik GRI (*GRI Topic Standards*) dalam seri 200, 300, dan 400 diberi skor 1 jika tercantum dalam laporan dan 0 jika tidak (Haniffa & Cooke, 2005; Michelon et al., 2015; Raucci & Tarquinio, 2020). SRDI diperoleh dengan membagi jumlah butir yang diungkapkan dengan total butir yang ada dalam daftar periksa (*checklist*). Standar Universal GRI (*GRI Universal Standards*) tidak disertakan karena isinya terutama mencakup prinsip dan prosedur pelaporan. Substansi Standar Topik cenderung stabil meskipun terdapat pembaruan, sehingga ukuran ini menjadi lebih konsisten dari waktu ke waktu. GRI 207 tidak disertakan untuk menghindari penghitungan ganda dalam Indeks Transparansi Pajak (*Tax Transparency Index*/TTI). Indeks Transparansi Pajak merupakan skor rata-rata dari empat butir dikotomis GRI 207 (207-1 hingga 207-4) dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Penyusunan masing-masing variabel tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Operasionalisasi variabel

Variabel	Pengukuran	Dasar
CETR (Y)	Pajak kas yang dibayarkan ÷ laba sebelum pajak; nilai tinggi berarti penghindaran pajak rendah; diwinsorisasi pada persentil 1 dan 99	Dyreng et al. (2008)
SRDI (X)	Proporsi butir GRI seri 200, 300, dan 400 yang diungkapkan (skor 1/0), tanpa GRI 207	Haniffa & Cooke (2005); Michelon et al. (2015)
TTI (Z)	Rata-rata skor 1/0 atas pengungkapan GRI 207-1 hingga 207-4	GRI (2019)
XZ	Interaksi SRDI × TTI	Sharma et al. (1981)
Firm Size	Logaritma natural total aset	Stickney & McGee (1982)
ROA	Laba terhadap total aset	Gupta & Newberry (1997)
DAR	Total utang ÷ total aset	Stickney & McGee (1982)

Sumber: diolah penulis.

Dari variabel-variabel itu dibentuk dua model regresi data panel. Model 1 menguji H1, dan Model 2 menguji H2 serta H3:

$$CETR_{it} = \alpha + \beta_1 SRDI_{it} + \gamma_1 SIZE_{it} + \gamma_2 ROA_{it} + \gamma_3 DAR_{it} + u_{it} \quad (1)$$

$$CETR_{it} = \alpha + \beta_1 SRDI_{it} + \beta_2 TTI_{it} + \beta_3 (SRDI \times TTI)_{it} + \gamma_1 SIZE_{it} + \gamma_2 ROA_{it} + \gamma_3 DAR_{it} + u_{it} \quad (2)$$

Koefisien β_3 menguji apakah hubungan antara SRDI dan CETR bergantung pada transparansi pajak perusahaan. Uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih model (Baltagi, 2021). Pemeriksaan diagnostik dilakukan untuk memastikan validitas model dengan memeriksa normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (menggunakan uji Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Skewness-Kurtosis, VIF, Breusch-Pagan, serta Wooldridge). Peran moderasi dari transparansi pajak diklasifikasikan berdasarkan kerangka kerja yang dikemukakan oleh Sharma et al. (1981), dan analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata. CETR dapat dipengaruhi oleh perilaku pembayaran pajak serta perbedaan waktu (temporal) antara pencatatan akuntansi dan pembayaran kas. Dengan demikian, nilai CETR yang rendah tidak serta-merta menjadi indikator penghindaran pajak (*tax evasion*). Studi ini menelaah perilaku kepatuhan pajak dan tidak membuat klaim apa pun mengenai apakah suatu perusahaan telah melakukan tindakan yang sah maupun melanggar hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Statistik deskriptif (N = 72)

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Simpangan baku
CETR (Y)	0,0122	0,4681	0,2366	0,1089
SRDI (X)	0,2024	0,9610	0,7513	0,1741
Tax transparency/TTI (Z)	0,0000	1,0000	0,5417	0,4111
XZ (SRDI × TTI)	0,0000	0,9524	0,4331	0,3475
Firm Size	17,5481	26,7473	22,6154	2,1699
ROA	0,0012	0,1494	0,0558	0,0302
DAR	0,1141	0,8221	0,5120	0,1665

Sumber: diolah dari hasil penelitian dan output Stata (2026).

Data terlebih dahulu diringkas menggunakan statistik deskriptif, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3. Rata-rata CETR adalah 0,2366, atau tingkat pajak kas sekitar 23,7% dari laba sebelum pajak. Perilaku pembayaran pajak kas di antara perusahaan-perusahaan dalam sampel sangat bervariasi, yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi sebesar 0,1089. Untuk laporan ASRA yang terpilih, nilai rata-rata SRDI adalah 0,7513, yang mengindikasikan transparansi pajak yang

luas; namun, nilai TTI justru menunjukkan variasi yang lebih besar. Untuk TTI, nilai rata-ratanya adalah 0,5417 dengan standar deviasi 0,4111, dan nilai minimumnya adalah nol, menunjukkan bahwa, untuk periode yang tercakup dalam beberapa laporan tersebut, sama sekali tidak terdapat pengungkapan sesuai dengan standar GRI 207.

Tabel 4. Pemilihan model data panel: statistik (probabilitas)

Model	Uji Chow (F)	Uji Hausman (χ^2)	Uji LM (chibar^2)	Model terpilih
Model 1	2,92 (0,0017)	6,28 (0,1792)	8,67 (0,0016)	REM
Model 2	3,25 (0,0007)	5,07 (0,5348)	13,30 (0,0001)	REM

Sumber: diolah dari output Stata (2026).

Selanjutnya, model yang akan digunakan dipilih dari berbagai kandidat yang ada dalam literatur, misalnya model data panel. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 4, yang menunjukkan bahwa, di antara pilihan-pilihan yang ada, model *fixed effects* dan *pooled OLS* bukanlah pilihan yang paling tepat. Berdasarkan pengujian untuk setiap model, model efek acak (*random effects* model) lebih tepat digunakan; oleh karena itu, estimasi dilakukan dengan menggunakan model tersebut. Sebagaimana dalam tahap pembersihan data awal, tidak ada jaminan bahwa semua variabel penjelas (*regressor*) akan memenuhi syarat eksogenitas, sehingga hubungan yang ditemukan sebaiknya ditafsirkan sebagai asosiasi saja.

Tabel 5. Uji asumsi model dasar

Uji	Statistik	Prob.	Kesimpulan
Shapiro-Wilk (W)	0,9831	0,4471	Residual normal
Shapiro-Francia (W′)	0,9875	0,6043	Residual normal
Skewness-kurtosis (χ^2 adj.)	0,88	0,6452	Residual normal
Breusch-Pagan, df = 1 (χ^2)	3,00	0,0834	Tidak signifikan pada 5%
Wooldridge, df = (1; 12) (F)	0,371	0,5539	Tidak ada autokorelasi
Multikolinearitas (rata-rata VIF)	1,15	-	Seluruh VIF ≤ 1,20

Sumber: diolah dari output Stata (2026).

Tabel 5 memuat data terkait normalitas residual dan ketiadaan autokorelasi, serta mencakup data VIF yang seluruhnya berada di bawah 1,20. Uji Breusch-Pagan menunjukkan hasil tidak signifikan pada tingkat 5%, namun signifikan pada tingkat 10% (p = 0,0834). *Robust Standard Errors* (galat baku yang kuat) yang dikelompokkan (*clustered*) pada tingkat perusahaan perlu dilaporkan. Estimasi tersebut belum dilakukan dan akan menjadi bagian dari agenda penelitian selanjutnya.

Tabel 6. Hasil estimasi *random effects*, variabel dependen CETR

Variabel	Model 1: B (SE)	Sig.	Model 2: B (SE)	Sig.
(Konstanta)	0,3279 (0,1520)	0,031	0,3404 (0,1613)	0,035
SRDI (X)	0,2006 (0,0571)	0,000	0,1946 (0,0683)	0,004
Tax transparency/TTI (Z)	-	-	0,1595 (0,0896)	0,075
XZ (SRDI × TTI)	-	-	-0,1291 (0,1163)	0,267
Firm Size	-0,0048 (0,0068)	0,485	-0,0068 (0,0072)	0,344
ROA	-2,2894 (0,3245)	0,000	-2,1328 (0,3093)	0,000
DAR	-0,0101 (0,0855)	0,906	-0,0141 (0,0885)	0,873
R^2 overall	0,4815		0,5130	
Observasi (perusahaan)	72 (18)		72 (18)	

Sumber: diolah dari hasil penelitian dan output Stata (2026).

Hasil estimasi setelah pengujian asumsi disajikan dalam Tabel 6. Model 1 signifikan secara

statistik (Wald $\chi^2(4) = 53,22$, $p < 0,001$). SRDI memiliki hubungan positif yang signifikan dengan CETR (B = 0,2006, $p < 0,001$), dan hasil ini konsisten pada Model 2 (B = 0,1946, p = 0,004). Dengan demikian, H1 didukung. Peningkatan SRDI sebesar 0,10 menyebabkan perubahan pada CETR sekitar 0,020, yang setara dengan 2 poin persentase. Peningkatan sebesar satu standar deviasi pada SRDI (0,1741) menyebabkan perubahan pada CETR sebesar 0,035, atau sekitar 15% dari rata-rata CETR. Statistik ini hanya menunjukkan asosiasi, bukan kausalitas. TTI tidak signifikan pada tingkat 5% (B = 0,1595, p = 0,075), sehingga H2 tidak didukung. Interaksi antara SRDI dan TTI tidak signifikan (B = -0,1291, p = 0,267), sehingga H3 tidak didukung. Dari semua variabel kontrol, hanya ROA yang menunjukkan hasil signifikan dengan koefisien negatif pada kedua model.

Pelaporan keberlanjutan yang luas dan pajak yang lebih tinggi

Laporan keberlanjutan pada 18 perusahaan pemenang penghargaan ASRA cenderung berkaitan dengan jumlah pajak tunai (*cash taxes*) yang lebih besar relatif terhadap laba. CETR yang rendah mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Dyreng et al., 2008), sehingga hubungan positif yang ditemukan antara SRDI dan CETR merupakan temuan utama. Hasil tersebut selaras dengan interpretasi substantif dari teori legitimasi. Legitimasi moral menjadi sulit untuk dipertahankan ketika rendahnya pembayaran pajak dibarengi dengan pelaporan yang ekstensif (Deegan, 2002; Suchman, 1995).

Kontribusi pajak pada tingkat yang wajar merupakan suatu tanggung jawab ekonomi (Carroll, 1991). Studi lain, seperti yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) serta Sari dan Tjen (2016), menunjukkan hasil serupa. Sebaliknya, hasil penelitian Davis et al. (2016) serta Mayberry dan Watson (2021) menunjukkan temuan yang berbeda. Karena Xu et al. (2022) mengukur keterbacaan laporan sementara studi ini mengukur keluasan laporan, hasil dari kedua penelitian tersebut sulit untuk dibandingkan secara langsung. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh variasi dalam sampel yang digunakan serta cara pengukuran variabel. Standar Topik GRI (*GRI Topic Standards*) menjadi dasar bagi indeks yang digunakan untuk mengukur CSR; namun, ukuran ini lebih spesifik karena diterapkan pada entitas yang diketahui melaporkan CSR. Akurasi dari asumsi ini belum diuji.

Hasil ini mendukung gagasan mengenai "paradoks Starbucks" (*Starbucks paradox*) yang telah disebutkan sebelumnya dalam makalah ini. Perusahaan yang sangat aktif dalam pelaporan cenderung memiliki tarif pajak efektif kas (*cash effective tax rate*) yang lebih tinggi. Ada kemungkinan bahwa faktor-faktor yang tidak teramati, seperti kualitas audit perusahaan atau jangkauan operasional internasional, turut memengaruhi pelaporan perusahaan sekaligus tarif pajak efektif kasnya. Selain itu, mengingat sampel penelitian ini hanya mencakup 18 perusahaan, temuan ini harus digeneralisasi dengan hati-hati, terutama jika dikaitkan dengan perusahaan lain di Asia.

Transparansi pajak yang belum terbukti

Hasil yang diperoleh dari TTI dan SRDI tidak menunjukkan kesamaan. TTI tidak memiliki hubungan dengan tarif pajak efektif kas (CETR) dan tidak mampu memoderasi hubungan antara SRDI dan CETR. Sebagaimana dicatat oleh Sharma et al. (1981), ketika β_2 dan β_3 tidak signifikan, TTI diklasifikasikan sebagai moderator yang belum terbukti, atau sering disebut sebagai *potential homologiser*. Tanda negatif pada interaksi tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai indikator melemahnya hubungan, karena koefisiennya tidak signifikan. Dalam konteks deskriptif, nilai SRDI turun dari 0,1946 saat TTI = 0 menjadi 0,0655 saat TTI = 1, tanpa adanya perbedaan yang

signifikan secara statistik.

Ada tiga alasan potensial mengapa hasil tersebut diperoleh. Alasan pertama berkaitan dengan ukuran TTI yang hanya mencerminkan keberadaan atau tidaknya empat pengungkapan sehingga informasi umum tidak dapat dibedakan dari data banding yang rinci. Hasil penelitian Göttsche et al. (2024) juga sampai pada kesimpulan yang sama. Menurut temuan mereka tingkat pelaporan rinci di setiap negara menentukan reaksi investor. Hanya memberikan informasi tentang strategi pajak tidak memengaruhi masalah ini. Alasan kedua berkaitan dengan desainnya. Studi pelaporan tingkat negara mempertimbangkan persyaratan yang diwajibkan oleh regulator sedangkan Hechtner et al. (2024) membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adopsi. Dalam studi ini interaksi diuji antara perusahaan dalam sampel yang sebelumnya telah mengungkap GRI 207 setidaknya sekali. Alasan ketiga berkaitan dengan kekuatan dan variabilitas data. Sampel hingga 72 pengamatan dari 18 perusahaan sudah cukup untuk memberikan kekuatan kecil dalam menguji interaksi dan pengawasan pemangku kepentingan dari pemenang ASRA kemungkinan besar tinggi sehingga informasi pajak tambahan hanya memberikan sedikit pengawasan tambahan bagi pemangku kepentingan. Tiga alasan ini belum diperoleh secara langsung dari hasil regresi dan membutuhkan pengujian lebih lanjut.

Variabel kontrol

Di antara variabel kontrol ROA memiliki korelasi negatif yang signifikan secara statistik dengan CETR di kedua model (-2,2894 dan -2,1328). Peningkatan ROA sebesar satu deviasi standar (0,0302) menyebabkan penurunan CETR sekitar 0,069. Arah ini konsisten dengan kapasitas perencanaan pajak yang lebih besar pada perusahaan yang lebih profitabel. Waktu pembayaran dan perbedaan basis laba ikut memengaruhi CETR (Hanlon & Heitzman, 2010), jadi koefisien ini belum menjadi bukti perencanaan pajak yang agresif. Ukuran perusahaan dan DAR lazim dipakai sebagai determinan tarif pajak efektif (Gupta & Newberry, 1997; Stickney & McGee, 1982), dan keduanya tidak signifikan pada sampel ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan *Cash Effective Tax Rate* pada perusahaan pemenang *Asia Sustainability Reporting Awards* yang dianalisis. Karena CETR merupakan indikator yang berbanding terbalik dengan intensitas *tax avoidance*, hasil ini konsisten dengan interpretasi bahwa pengungkapan keberlanjutan yang lebih luas berkaitan dengan penghindaran pajak yang lebih rendah. Namun, hubungan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai hubungan kausal.

Transparansi pajak berbasis GRI 207 tidak menunjukkan hubungan langsung yang signifikan dengan CETR pada taraf lima persen dan tidak terbukti memoderasi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan CETR. Profitabilitas berkaitan negatif signifikan dengan CETR, sedangkan ukuran perusahaan dan leverage tidak menunjukkan hubungan parsial signifikan. Dengan demikian, transparansi pajak sebagai indikator keberadaan pengungkapan belum dapat dianggap sebagai mekanisme yang secara otomatis memperkuat konsistensi antara pelaporan keberlanjutan dan pembayaran pajak.

Secara praktis, perusahaan perlu meningkatkan kedalaman dan keterbandingan informasi GRI 207, bukan hanya memenuhi daftar item pengungkapan. Investor dan regulator sebaiknya menilai informasi keberlanjutan bersama indikator pembayaran pajak, karakteristik perusahaan, dan konteks yurisdiksi. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan skor kualitas pengungkapan, ukuran CETR jangka panjang, serta pengujian robust standard errors, efek negara, dan

kemungkinan endogenitas.

DAFTAR REFERENSI

Asmoro, P. S., Ramakrishnan, S., Arsyanda, S., Alfandia, N. S., Ningsih, D. N. C., Rokhimakhumullah, D. N. F., & Hidayat, K. (2024). ESG disclosure, governance, political connection, and tax aggressiveness: What information is critical, and is more information always forceful? *Cogent Business & Management, 11*(1), 2435600. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2435600

Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer.

Bergin, T. (2012). Special report: How Starbucks avoids UK taxes. Reuters.

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons, 34*(4), 39-48.

Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of Management Review, 20*(1), 92-117.

CSRWorks International. (2025). *Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA)*. https://www.csrworks.com

Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., & Williams, B. M. (2016). Do socially responsible firms pay more taxes? *The Accounting Review, 91*(1), 47-68.

Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15*(3), 282-311.

Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific Sociological Review, 18*(1), 122-136.

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review, 83*(1), 61-82.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.

Global Reporting Initiative. (2019). *GRI 207: Tax 2019*. Global Reporting Initiative.

Global Reporting Initiative. (2021). *GRI 1: Foundation 2021; GRI 2: General disclosures 2021; GRI 3: Material topics 2021*. Global Reporting Initiative.

Göttsche, M., Habermann, F., & Sieber, S. (2024). The materiality of non-financial tax disclosure: Experimental evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 54*, 100600. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100600

Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy, 16*(1), 1-34.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics, 50*(2-3), 127-178.

Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy, 24*(5), 391-430.

Hechtner, F., Weiß, M., Seebeck, A., & Hardeck, I. (2024). *Does public tax sustainability disclosure deter corporate tax avoidance? Evidence from GRI 207 reporting* [Working paper]. SSRN. https://ssrn.com/abstract=4910591

Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. *The Accounting Review, 88*(6), 2025-2059.

Joshi, P. (2020). Does private country-by-country reporting deter tax avoidance and income shifting? Evidence from BEPS Action Item 13. *Journal of Accounting Research, 58*(2), 333-381.

KPMG. (2024). *Survey of sustainability reporting 2024*. KPMG International.

Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy, 31*(1), 86-108.

Mayberry, M. A., & Watson, L. (2021). Is corporate social responsibility related to corporate tax avoidance? Evidence from a natural experiment. *The Journal of the American Taxation Association*. https://doi.org/10.2308/jata-19-021

Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. (2015). CSR reporting practices and the quality of disclosure: An empirical analysis. *Critical Perspectives on Accounting, 33*, 59-78.

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review, 22*(4), 853-886.

Overesch, M., & Wolff, H. (2021). Financial transparency to the rescue: Effects of public country-by-country reporting in the European Union banking sector on tax avoidance. *Contemporary Accounting Research, 38*(3), 1616-1643. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12669

Raucci, D., & Tarquinio, L. (2020). Sustainability performance indicators and non-financial information reporting: Evidence from the Italian case. *Administrative Sciences, 10*(1), 13. https://doi.org/10.3390/admsci10010013

Rudyanto, A., & Pirzada, K. (2020). The role of Sustainability Reporting in shareholder perception of tax avoidance. Social Responsibility Journal, 17(5), 669-685. https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2020-0022Sari, D., & Tjen, C. (2016). Corporate social responsibility disclosure, environmental performance, and tax aggressiveness. *International Research Journal of Business Studies, 9*(2), 93-104. https://doi.org/10.21632/irjbs.9.2.93-104

Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and analysis of moderator variables. *Journal of Marketing Research, 18*(3), 291-300.

Stickney, C. P., & McGee, V. E. (1982). Effective corporate tax rates: The effect of size, capital intensity, leverage, and other factors. *Journal of Accounting and Public Policy, 1*(2), 125-152.

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review, 20*(3), 571-610.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Xu, S., Wang, F., Cullinan, C. P., & Dong, N. (2022). Corporate tax avoidance and corporate social responsibility disclosure readability: Evidence from China. *Australian Accounting Review, 32*(2), 267-289. https://doi.org/10.1111/auar.12372

Zucman, G. (2022). International tax avoidance by multinational firms. *NBER Reporter, 2022*(3). National Bureau of Economic Research.